

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales* (Yunus & Rezki, 2020).

Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan (Wahidah, dkk, 2020).

Sejak wabah Covid-19 menjadi pandemi global, masalah ketersediaan APD (Alat pelindung Diri) bagi tenaga medis untuk menangani pasien terjangkit virus turut menjadi sorotan. Kondisi ini pula yang dihadapi industri Farmasi dan alat kesehatan (alkes) dalam memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis. Tak hanya kelangkaan dan sulit didapat, harga alkes dan APD pun sempat melambung tinggi (uui.ac.id).

Tidak hanya alat kesehatan yang sulit didapat, kebutuhan obat-obatan mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan bulan juni lalu, Menteri kesehatan Budi Gunadi Dasikit menjelaskan bahwa kebutuhan obat-obatan meningkat hingga 12 kali lipat (tribunnews.com).

Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut PP No. 51 Tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pengabdian kepada masyarakat (*non profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*). Kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Berkenaan dengan fungsi yang pertama, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan informasi, konsultasi, dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi yang kedua menyangkut pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di apotek sebagai suatu komoditas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan material bagi apotek dengan demikian apotek tetap dapat berkembang.

Apotek Jaya Farma Mojosoongo Jombang yang terletak di Jl. KH. Hasyim Asyari No. 112B Mojosoongo merupakan salah satu Apotek yang menyediakan berbagai obat, praktek dokter, produk nutrisi, produk herbal dengan pelayanan 24 Jam. Pada masa pandemic ini tentu Apotek Jaya Farma

Mojosongo Jombang memiliki beberapa masalah khususnya dalam persediaan obat-obatan. Masalah tersebut seperti Sistem kontrol/ wewenang dalam jumlah penyediaan obat hanya ada di admin sehingga jika terjadi kesalahan seperti admin terlalu banyak obat yang diorder atau persediaan obat yang sudah diorder habis dalam kurun waktu yang sudah direncanakan di awal akan mempengaruhi jumlah tagihan pembelian di bulan depannya. Permintaan obat dari supervisor melebihi perencanaan admin pembelian. Waktu jatuh tempo pembayaran pembelian obat biasanya diusahakan beli di distributor yang jatuh temponya 1 bulan jika jatuh tempo distributor hanya 21 hari sebisa mungkin apotek harus menghabiskan obat itu sebelum jatuh tempo. Kemudian juga sering terjadi keterlambatan pengiriman obat dari distributor. Penerimaan obat dari distributor tidak sesuai dengan surat pemesanan. Obat yang sudah dipesan tidak datang dari distributor sehingga perlu diorderkan ulang menambah waktu tunggu.

Permasalahan pada Apotek Jaya Farma Mojosongo Jombang menunjukkan pentingnya persediaan obat dalam Apotek. Menurut Dewi, dkk (2012) persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya.

Menurut Yuli dan Eka (2017) persediaan (*inventory*) adalah merupakan sistem manajemen dalam menentukan keseimbangan antara investasi penyimpanan persediaan barang dengan pelayanan pelanggan. Persediaan yang pada umumnya adalah salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar didalam suatu perusahaan. Dimana hal ini dapat

dipahami dengan mudah karena persediaan ialah sebuah faktor yang penting dalam menentukan kelancaran operasi sebuah perusahaan.

Terkadang dalam penerapannya, metode pencatatan maupun penilaian persediaan belum dilakukan dengan baik oleh perusahaan karena beberapa faktor di antaranya kekurangan informasi terhadap metode pencatatan dan penilaian persediaan terbaru, kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan untuk menerapkan metode yang layak, ataupun perusahaan sudah merasa cocok dengan metode yang digunakan selama ini sehingga perusahaan takut jika mengganti dengan metode yang baru akan sulit untuk menyesuaikan dengan sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini.

Dengan adanya masalah persediaan obat pada Apotek Jaya Farma Mojosoongo Jombang seperti dalam pencatatan maka tentu akan berdampak pada stock fisik dengan pencatatannya. Kesalahan dalam pencatatan dan penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan laba/rugi maupun neraca. Kesalahan dalam mencatat besarnya fisik persediaan akan menyebabkan salah satu dalam saldo persediaan akhir, karena persediaan merupakan aktiva lancar maupun total aktiva perusahaan secara keseluruhan juga akan menjadi salah saji di neraca.

Sistem akuntansi yang baik yaitu penilaian terhadap persediaan akan menjadi suatu sarana untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam evaluasi perusahaan serta sebagai alat untuk pengendalian internal yang baik. Perusahaan dituntut untuk mampu menerapkan kebijakan

akuntansi perusahaan dengan baik agar dapat memberikan informasi yang akurat guna kelancaran aktivitas perusahaan. Karena itulah perusahaan wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu tepatnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2009.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009 dijelaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan, bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan termasuk aktiva lancar dikarenakan jumlah kas yang dimiliki perusahaan akan bertambah seiring dengan penjualan barang secara tunai. Tetapi jika penjualan barang secara kredit maka perusahaan harus menunggu dalam tenggang waktu tertentu sampai pembeli tersebut membayar hutangnya sehingga dapat menambah jumlah kas perusahaan.

SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi yang tergolong sederhana. Berbeda dengan PSAK, SAK ETAP diperuntukkan kepada perusahaan atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Selain secara garis besar standar akuntansinya, aspek terpenting dalam keuangan seperti persediaan pun diatur dalam standar akuntansi ini dengan terperinci, sama dengan PSAK. Dengan diadakannya SAK ETAP, diharapkan entitas yang bergerak dari

kalangan bawah hingga menengah dapat mengaplikasikannya untuk menciptakan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan, terutama dalam pembuatan keputusan untuk penentuan langkah unit usaha selanjutnya.

Metode pencatatan dan penilaian persediaan yang diterapkan oleh perusahaan juga tidak semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009 dijelaskan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan persediaan dan lain sebagainya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) tahun 2009 dijelaskan pula mengenai perlakuan akuntansi untuk persediaan, ruang lingkup yang dapat digolongkan sebagai persediaan, pengukuran persediaan, biaya-biaya untuk mempengaruhi persediaan, dan juga mengenai pengungkapan persediaan yang ada dalam perusahaan tersebut.

Penelitian dilakukan oleh Budianto dan Ferriswara (2017) menjelaskan bahwa sistem pencatatan persediaan yang dipakai adalah dengan menerapkan sistem pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik, dimana perusahaan beranggapan harus mengecek langsung kondisi fisik satu persatu persediaan barang dagangan yang tersedia pada perusahaan. Dengan demikian kepala gudang bisa melaporkan kondisi barang apakah barang dagangan masih layak dijual apa tidak. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik mengenai

persediaan. Pencatatan persediaan telah disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada laporan laba atau rugi yang disajikan melalui atau menentukan harga pokok penjualan dan persediaan disajikan pada neraca pada kolom aset lancar. Dalam pencatatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik mengenai persediaan. Metode penilaian persediaan yang dipakai dalam menggunakan metode penilaian FIFO (*first in first out*)/MPKP (masuk pertama keluar pertama). Metode ini digunakan agar tidak menimbun barang dagangan terlalu lama sehingga barang yang dijual merupakan barang layak jual. Metode ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik mengenai persediaan

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari Ransun (2015) dimana menjelaskan bahwa pencatatan persediaan pada perusahaan menggunakan pencatatan perpetual dan metode yang digunakan perusahaan adalah FIFO (*First in first out*) dimana persediaan yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar. Akuntansi persediaan barang dagang telah sesuai dengan PSAK No.14, tetapi dalam pencatatannya belum sesuai standar yang ada.

Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Apotek Jaya Farma Mojosoongo Jombang dan didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntansi Persediaan Obat Sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik SAK ETAP Pada Apotek Jaya Farma Mojosongo Jombang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana perlakuan akuntansi persediaan obat Apotek Jaya Farma Mojosongo Jombang sesuai dengan SAK ETAP?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi persediaan obat Apotek Jaya Farma Mojosongo Jombang sesuai dengan SAK ETAP

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

A. Manfaat Praktis

Diharapka hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk menganalisis penerapan akuntansi persediaan barang khususnya obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tidak terjadi banyak kendala dalam pengadaannya.

B. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang akuntansi, khususnya sistem akuntansi persediaan
2. Bagi pembaca adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang sistem akuntansi persediaan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi sebagai penelitian selanjutnya

3. Bagi Apotek Jaya Farma Mojosongo Jombang dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan atas kekurangan yang ada, guna tercapainya tujuan yang hendak dicapai.